

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR :22 TAHUN 2017  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TUBAN

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TAMBAKBOYO  
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016-2021**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan ini disusun untuk memberikan gambaran secara umum jenis aktivitas/kegiatan serta pelayanan publik yang akan dilaksanakan di Kecamatan Tambakboyo khususnya dalam mendukung program kerja dan pencapaian visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih selama 5(lima) tahun kedepan.

Secara umum Renstra ini diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar,yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun kedepan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Selain itu Renstra juga merupakan salah satu dokumen yang menjadi dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat yang akan dievaluasi setiap akhir tahun yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

**1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Kecamatan Tambakboyo Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Desa /Kelurahan di Kabupaten tuban.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### 1.3.1 Maksud

Renstra OPD ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Tambakboyo, penguatan peran serta stakeholders dalam pelaksanaan rencana kerja serta merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

#### 1.3.2 Tujuan

Meningkatkan kinerja Kecamatan Tambakboyo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi, misi yang telah ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dalam rangka mendukung tugas pemerintahan di Kabupaten Tuban.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Renstra OPD Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban Tahun 2016 – 2021 disusun sebagai berikut :

**BAB I. PENDAHULUAN**, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lain serta sistematika penulisan

**BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD**, memuat tugas, fungsi, sumberdaya OPD, kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan OPD lima tahun terakhir serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD

**BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**, memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah renstra K/L dan renstra, telaah rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis

**BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**, memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan OPD yang hendak dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif dan diwujudkan dalam kebijakan dan program OPD

**BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**, merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD Kabupaten Tuban, Propinsi Jawa Timur, APBN maupun sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode lima tahun dan tahunan

**BAB VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN**, merupakan penjelasan indikator kinerja OPD untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

**BAB VII. PENUTUP**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN OPD

#### 2.1 TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban disebutkan bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan keberadaan kelurahan dalam Kecamatan bahwa Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah di dalam wilayah Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Susunan organisasi Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor : 69 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016.

Susunan organisasi Kecamatan terdiri atas :

1. Camat;
2. Sekretariat Kecamatan;
3. Seksi Pemerintahan.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat; dan
7. Seksi Pelayanan Umum.

Adapun tugas dan fungsi Kecamatan sesuai struktur organisasi adalah sebagai berikut :

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kecamatan dengan tipe A.
- (3) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
  - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - j. Perumusan inovasi terkait tugas dan fungsinya dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
  - k. Pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
  - l. Pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Bupati; dan
  - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (6) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat kecamatan.

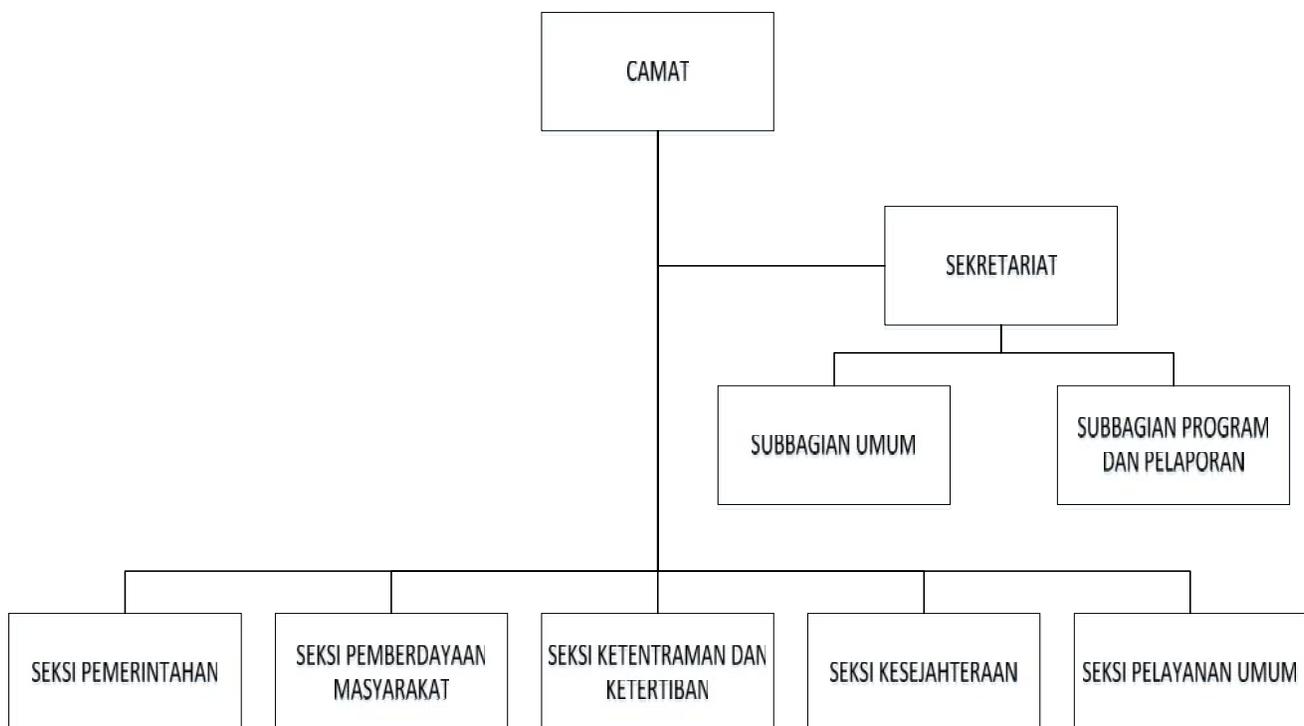
Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh perangkat kecamatan.

### 2.1.3. Struktur Organisasi :

Adapun Struktur organisasi Kecamatan Tambakboyo adalah sebagai berikut :

#### **SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN KABUPATEN TUBAN**



**Gambar 2.1**

### 2.2. Sumber Daya OPD

Sumberdaya yang dimiliki di Kecamatan Tambakboyo dalam menjalankan tugas dan fungsinya meliputi semua sumberdaya yang ada di Kantor Kecamatan dan 18Desameliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang operasional (asset/modal). Secara rinci sumberdaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 2.2.1. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai Kecamatan Tambakboyo termasuk 9Desa sampai dengan Desember 2016 sebanyak 25(Dua puluh Lima) orang. Rincian jumlah pegawai Kecamatan Tambakboyo Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

**Tabel 2.1**

No	Status Kepegawaian	Jumlah Orang
1	Pegawai Negeri Sipil Daerah	25
2	Tenaga Honorer (K1)	1
3	Tenaga Honorer tidak masuk ( K1)	0
4	Tenaga Sukwan (K2)	0
5	Tenaga Sukwan (tidak masuk K2)	1
	<b>Jumlah</b>	<b>27</b>

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 2.2**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase
1	Pasca Sarjana	1	1 %
2	Sarjana	5	36 %
3	Sarjana Muda	2	4 %
3	SLTA	17	57 %
4	SLTP	0	0 %
5	SD	0	0 %
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

**Tabel 2.3**

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Tk.1	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	1
3	Penata Tingkat I	III/d	2
4	Penata	III/c	2
5	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
6	Penata Muda	III/a	2
7	Pengatur Tingkat I	II/d	1
8	Pengatur	II/c	1
9	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	7
10	Pengatur Muda	II/a	5
11	Juru Tingkat I	I/d	0
12	Juru	I/c	1
13	Juru Muda Tingkat I	I/b	0
14	Juru Muda	I/a	0
	<b>Jumlah</b>		<b>25</b>

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Jabatan

**Tabel 2.4**

No	Jenis Jabatan	Jumlah (Orang)	%
1	Struktural	25	-
2	Fungsional	0	-
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>-</b>

e. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 2.5**

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	%
1	Laki-Laki	20	58,67%
2	Perempuan	5	41,32 %
	<b>Jumlah</b>	<b>25</b>	<b>100 %</b>

**2.2.2. Perlengkapan**

**2.2.3.**

Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan operasional di Kecamatan Tambakboyo sampai akhir tahun 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7**

NO	JENIS	BANYAKNYA	SATUAN
1	Gedung kantor	16	Unit
2	Rumah dinas Camat	1	Unit
3	Pendopo	1	Unit
4	Mushola	1	Unit
5	Kendaraan roda 4 (empat)	1	Unit
6	Kendaraan roda 2 (dua)	26	Buah
7	Mesin Ketik	1	Buah
8	Personal Komputer	7	Unit
9	Meja Kerja	25	Buah
10	Kursi kerja	70	Buah
11	Meja rapat	4	Buah
12	Pesawat telepon	1	Buah

13	Pesawat HT	1	Buah
14	Felling Cabinet	1	Buah
15	Almari	9	Buah
16	Telpon fax	1	Buah
17	Meja Podium	1	Buah

## 2.3 Kinerja Pelayanan OPD

### 2.3.1. Keadaan Sekarang

Kinerja Kecamatan Tambakboyo tercermin dalam pencapaian sasaran - sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Kelancaran kegiatan kantor;
2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur;
3. Tersusunnya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan;
4. Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan dan peningkatan kualitas SDM dalam pengetahuan, kemampuan serta tersedianya data yang akurat;
5. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat;
6. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah Kecamatan;
7. Terselenggaranya koordinasi pemerintah Kecamatan.

Kinerja sasaran ini rata - rata mencapai 100 %. Dalam usaha mencapai sasaran Kecamatan Tambakboyo menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) program. Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tabel 2.8 berikut ini :

**Tabel 2.8**

NO	INDIKATOR SASARAN	TAHUN 2011 - 2015		PENCAPAIAN
		TARGET	REALISASI	TARGET
1	Prosentase tersedianya administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %
2	Prosentase tersedianya Kapasitas SumberDaya aparatur	100 %	100 %	100 %
3	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran	100 %	100 %	100 %
4	Prosentase tersedianya	100 %	100 %	100 %

	sarana pendukungguna peningkatan SDM dan hasil kegiatan			
5	Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat	100 %	100 %	100 %
6	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan	100 %	100 %	100 %
7	Prosentase terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik	100 %	100 %	100 %

Dari 7 (tujuh) indikator tersebut nampak bahwa 7 (tujuh) indikator berhasil mencapai 100 %.

Selanjutnya kinerja anggaran dan realisasinya dalam kurun waktu Tahun 2011 – 2015 dapat dilihat pada tabel 2.9 dibawah ini :

**Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan Tambakboyo  
Tahun 2011 – 2015**

**Tabel 2.9**

<b>Tahun Ke</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Rasio antara Realisasi dan Anggaran</b>
1	7.334.896.787,00	7.136.904.269,00	97,30%
2	8.310.385.426,00	8.165.664.641,00	98,26%
3	9.382.986.436,00	9.036.282.754,84	96,30%
4	9.654.189.577,00	9.237.690.160,00	97,19%
5	10.477.392.660,00	9.995.720.724,00	92,14%
<b>Rata-Rata</b>	<b>45.159.850.886.49</b>	<b>43.572.262.548,00</b>	<b>96,48%</b>

Sumber data : DPA-DPPA SKPD Kec Tambaboyo

Secara umum rasio antara realisasi dan anggaran pada kurun waktu 2011 – 2015 tercapai cukup baik dengan rata-rata sebesar 96,48%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan pembangunan anggaran yang telah direncanakan mampu terlaksana dengan baik dan mampu melakukan efisiensi anggaran sebesar 3,52%. Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan tersebut antara lain adalah proses perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik serta kinerja aparatur yang bertanggung jawab.

Keadaan yang diharapkan lima tahun yang akan datang :

1. Beragam masalah dihadapi sekarang ini dalam bidang pembangunan dari berbagai sektorsehingga memerlukan prioritas program dan kegiatan. Hal tersebut telah dimusyawarahkan dalam musrenbang tingkat Kecamatan, tetapi dari hasil musrenbang tersebut masih banyak yang belum masuk dalam prioritas program dan kegiatan dinas instansi terkait di tingkat Kabupaten. Harapannya kedepan dinas instansi tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan program dan kegiatan memprioritaskan pada hasil musrenbang tingkat Kecamatan.
2. PBB diharapkan online, serta diberikan peta blok untuk kecamatan di masing-masing Desa, usulan perubahan mutasi kalau bisa tepat waktu, begitu juga untuk penyampaian SPPT ke Kecamatan.
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan dengan indikator masih lemahnya administrasi desa/kelurahan terkait pembuatan APBDesa, RPJM Desa/Kelurahan, Monografi, SPJ ADD/DD dan lain sebagainya. Kecamatan sebagai tim fasilitasi telah bekerja secara maksimal dengan sistem jemput bola, membina dan memfasilitasi. Kedepan tentu persoalan ini akan menjadi prioritas dengan memanfaatkan program dan kegiatan yang telah ada yaitu Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
4. Belum optimalnya kinerja Aparatur Pemerintahan mengingat kondisi bangunan gedung kantor yang kurang representatif yakni terbatasnya ruangan/sempit dan bocor pada waktu hujan sehingga perlu rehab berat kantor. Diharapkan dengan rehab berat, ditambahkan ruangan untuk berkantor PKH, Pendamping Desa, PKK, Sekretariat UKS, Sekretariat Pokjandal Kabupaten sehat, ruang rapat kantor dan ruang Pelayanan Publik yang lebih representatif.
5. Persoalan sosial di Kecamatan Tambakboyo cukup banyak antara lain : produsen arak terbesar, maraknya peredaran dan penggunaan narkoba, kenakalan remaja, perjudian, angka kecelakaan tertinggi di Kabupaten Tuban, tingginya angka kemiskinan, tingginya kriminalitas yang perlu koordinasi lebih intensif dengan stakeholder terkait. Untuk optimalisasi penanganan perlu pembentukan satgas – satgas agar penanganan bisa berjalan lebih efektif.

6. Potensi alam dan wilayah sangat menjanjikan tetapi belum tergarap secara optimal sehingga butuh koordinasi, fasilitasi, pendampingan kepada desa agar potensi wilayah yang ada dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 2.3.2. Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atas pelayanan barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus ditingkatkan sehingga mencapai kualitas yang diharapkan. Dan untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat. Kecamatan Tambakboyo sebagai penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk memberikan layanan yang berkualitas, bersih, dan transparan. Oleh karenanya perlu upaya untuk terus meningkatkan pelayanan sehingga sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Kondisi tempat pelayanan didapatkan dari hasil observasi langsung di tempat pelayanan publik Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban, dan hasilnya disajikan pada tabel 2.10 berikut ini:

**Tabel 2.10**

Kondisi Tempat Pelayanan di Kecamatan Tambakboyo

No	Fasilitas	Kondisi
1	Loket Khusus Pelayanan	Ada, Kondisinya baik
2	Ruang tunggu	Ada, Kondisinya cukup
3	Kapasitas ruang tunggu	15 orang
4	Pendingin ruangan (AC/kipas angin)	Ada, Kondisinya cukup
5	Pengeras suara	Tidak ada
6	Sistem nomor antrian	Tidak Ada
7	TV di ruang tunggu	Ada
8	Pengumuman/informasi tentang prosedur pengurusan layanan(SOP)	Ada

9	Pengumuman/informasi tentang PERSYARATAN pengurusan layanan	Ada
10	Pengumuman/informasi tentang BIAYA pengurusan layanan	Ada
11	Pengumuman/informasi tentang LAMA WAKTU PENYELESAIAN pengurusan layanan	Ada
12	Kotak pengaduan/saran	Ada, kondisinya baik
13	Tempat parker	Ada, kondisinya cukup
14	Toilet untuk pengguna layanan	Ada
15	Jenis toilet untuk pengguna layanan	
	a. Toilet laki-laki	Ada
	b. Toilet perempuan	Ada
16	Fasilitas toilet	
	a. Kloset jongkok	Ada, kondisinya cukup
	b. Tempat air	Ada, kondisinya baik
	c. Gayung	Ada, kondisinya baik
	d. Kran	Ada, kondisinya baik
	e. Tempat sampah	Ada, kondisinya cukup
	f. Urinial	Ada, kondisinya cukup
	g. Wastafel	Ada, kondisinya cukup
	h. Cermin	Ada, kondisinya cukup
	i. Penanda toilet	Ada, kondisinya baik
17	Ruang khusus merokok	Ada
	a. Tempat duduk	Ada
	b. Meja	Ada
	c. Alat penghisap udara/sirkulasi udara	Ada
	d. Penanda R. Smoking Area	Ada
18	Fasilitas R. Pojok Asi	Tidak ada
	a. Kursi	Tidak ada
	b. Meja	Tidak ada
	c. Westafel	Tidak ada
	d. Sabun cuci tangan	Tidak ada
	e. Penanda pojok ASI	Tidak ada
19	Spanduk/stiker/banner/dll yang berisi larangan suap/korupsi/KKN	Ada
20	Spanduk/banner/dll yang berisis Visi & Misi Kecamatan	Ada

Terdapat beberapa fasilitas yang kondisinya sudah baik dan memadai seperti loket, pendingin ruangan, dan ruang khusus merokok. Namun beberapa fasilitas penting lainnya justru belum tersediadiantaranya pengeras suara, sistem nomer antrian, pengumuman/informasi tentang biaya pengurusan layanan, pengumuman/informasi tentang lama waktu penyelesaian pengurusan layanan, dan ruang khusus menyusui.

Berikut ini adalah kondisi riil dari tempat pelayanan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban:



**Gambar 2.2**  
Tampak Depan Kecamatan Tambakboyo

- Loket khusus pelayanan



**Gambar 2.3**

## Loket Khusus Pelayanan di Kecamatan Tambakboyo

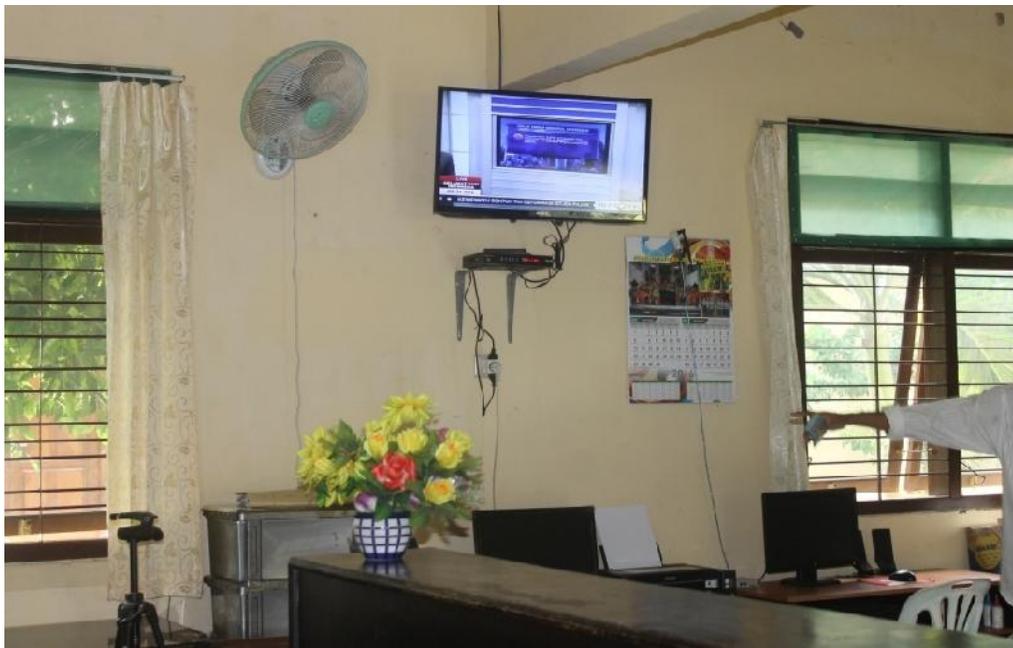
- Ruang tunggu pelayanan



**Gambar 2.4**  
Ruang Tunggu Pelayanan di Kecamatan Tambakboyo



**Gambar 2.5**  
Pendingin Ruangan di Ruang Tunggu Pelayanan di Kecamatan Tambakboyo



**Gambar 2.6**  
TV di Ruang Tunggu Pelayanan di Kecamatan Tambakboyo

▪ **Pengumuman/informasi tentang pelayanan**



**Gambar 2.7**  
Informasi Tentang Prosedur/Tahapan Pengurusan Layanan di Kecamatan Tambakboyo



▪ **Tempat parkir**



**Gambar 2.10**  
Tempat Parkir Kendaraan di Kecamatan Tambakboyo

▪ **Toilet**



**Gambar 2.11**  
Toilet di Kecamatan Tambakboyo

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kualitas pelayanan Kecamatan Tambakboyo Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:

Bottom Two Boxes (%)	Indikator Penilaian	Top Two Boxes (%)
5	Persyaratan pelayanan	95
8	Prosedur pelayanan	92
17	Waktu pelayanan	84
6	Biaya/tarif pelayanan	94
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	95
5	Kompetensi pelaksana	95
6	Perilaku pelaksana	95
3	Maklumat pelayanan	97
8	Penanganan pengaduan, saran, & masukan	92

**Gambar 2.12**  
Persentase Jawaban Responden Kecamatan Tambakboyo – 9 Indikator

*Top Two Boxes* pada Gambar 2.13 diatas menunjukkan persentase responden yang menjawab “puas” (memilih jawaban 3 dan 4) dan *Bottom Two Boxes* menunjukkan persentase responden yang menjawab “tidak puas” (memilih jawaban 1 dan 2) pada setiap indikator penilaian layanan Kecamatan Tambakboyo. Indikator yang memiliki persentase *Top Two Boxes* paling besar adalah Maklumat Pelayanan dengan persentase 97% responden, sedangkan indikator yang memiliki persentase *Bottom Two Boxes* paling besar adalah Waktu Pelayanan sebesar 17% responden.

**Tabel 2.11**

Persentase Jawaban Responden Kecamatan Tambakboyo – 18 Sub Indikator

Sub Indikator Pelayanan	Bottom Two Boxes (%)	Top Two Boxes (%)
1 Kesesuaian antara persyaratan dengan jenis layanan	3%	97%
2 Persyaratan pengurusan layanan	7%	93%
3 Kemudahan mendapatkan informasi prosedur pelayanan	8%	92%
4 Prosedur layanan	8%	92%
5 Ketetapan jadwal/waktu pelayanan dengan yang telah ditetapkan	13%	87%
6 Kecepatan pelayanan	20%	80%
7 Transparansi biaya pengurusan layanan	12%	88%
8 Kewajaran biaya	3%	97%
9 Kesesuaian antara biaya yang anda bayar dengan yang ditetapkan	3%	97%
10 Variasi atau kelengkapan jenis layanan	8%	92%
11 Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan	2%	98%
12 Kedisiplinan petugas dalam melayani	5%	95%
13 Tanggungjawab petugas dalam melayani	2%	98%
14 Kemampuan petugas dalam melayani	7%	93%
15 Kesopanan dan keramahan petugas dalam melayani	8%	92%
16 Keadilan petugas dalam melayani	3%	97%
17 Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani	3%	97%
18 Kecepatan penanganan pengaduan/keluhan masyarakat	8%	92%

Sedangkan pada Tabel 2.11 adalah persentase responden yang menjawab puas dan tidak puas pada setiap sub indikator penilaian. Sub indikator yang memiliki persentase *Top Two Boxes* paling besar adalah Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan Tanggungjawab petugas dalam melayani dengan persentase masing-masing 98% responden. Sedangkan sub indikator yang memiliki persentase *Bottom Two Boxes* paling besar adalah Kecepatan Pelayanan dengan persentase 20% responden. Jika persentase *Top Two Boxes* paling besar, tidak serta merta nilai IKM-nya menjadi paling tinggi, karena nilai IKM diperoleh dari rata-rata tertimbang.

**Tabel 2.11**  
IKM di Kecamatan Tambakboyo – 9 Indikator

Indikator Pelayanan	IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja
Persyaratan pelayanan	78,38	B	Baik
Prosedur pelayanan	78,13	B	Baik
Waktu pelayanan	75,63	B	Baik
Biaya/tarif pelayanan	84,33	B	Sangat Baik
Produk spesifikasi jenis pelayanan	76,29	B	Baik
Kompetensi pelaksana	72,25	B	Baik
Perilaku pelaksana	74,63	B	Baik
Maklumat pelayanan	76,25	B	Baik
Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	73,25	B	Baik
<b>Kec. Tambakboyo</b>	<b>77,38</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>

Pada Tabel 2.12 ditunjukkan nilai IKM Kecamatan Tambakboyo dan 9 indikator penyusunnya. Nilai IKM Kecamatan Tambakboyo Tahun 2015 diperoleh sebesar 77,38, nilai tersebut masuk dalam mutu pelayanan kategori B dengan kategori kinerja Baik. Dari 9 indikator penilaian, nilai IKM berada pada rentang 73,25 hingga 84,33. Terdapat 1 indikator yang dinilai memiliki kinerja Sangat Baik yaitu Biaya/Tarif Pelayanan. Indikator yang memiliki nilai IKM terendah adalah Penanganan pengaduan, saran, & masukan (73,25).

**Tabel 2.12**  
IKM di Kecamatan Tambakboyo – 18 Sub Indikator

Sub Indikator Pelayanan	SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja
Kesesuaian antara persyaratan pelayanan dengan jenis layanan	86,25	A	Sangat Baik
Kewajaran Biaya	84,25	A	Sangat Baik
Transparansi biaya pengurusan layanan	82,50	A	Sangat Baik
Persyaratan pengurusan layanan	81,25	B	Baik
Ketepatan jadwal/waktu pelayanan dengan yang telah ditetapkan	78,75	B	Baik
Kemudahan mendapatkan informasi prosedur pelayanan	78,25	B	Baik
Prosedur layanan	78,00	B	Baik
Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan	77,00	B	Baik
Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani	76,25	B	Baik
Kesesuaian antara persyaratan dengan	75,50	B	Baik

jenis layanan			
Variasi atau kelengkapan jenis pelayanan	75,50	B	Baik
Tanggung jawab petugas dalam melayani	75,50	B	Baik
Kemampuan petugas dalam melayani	75,50	B	Baik
Keadilan petugas dalam melayani	75,50	B	Baik
Kesopanan dan keramahan petugas dalam melayani	74,25	B	Baik
Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani	74,75	B	Baik
Kedisiplinan petugas dalam melayani	73,75	B	Baik
Kecepatan penanganan pengaduan /keluhan masyarakat	73,25	B	Baik
Kecepatan Pelayanan	72,50	B	Baik
<b>Kecamatan Tambakboyo</b>	<b>77,38</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>

Sedangkan secara lebih detail tersaji pada Tabel 2.13 yang ditunjukkan nilai IKM Kecamatan Tambakboyo 18 sub indikator penyusunnya. Dari 18 sub indikator penilaian, nilai IKM berada pada rentang 72,50 hingga 86,25. Ada 3 sub indikator yang dinilai memiliki kinerja Sangat Baik yaitu Kesesuaian antara biaya yang anda bayar dengan biaya yang telah ditetapkan, Kewajaran biaya, dan Transparansi biaya pengurusan layanan. Sub indikator yang memiliki nilai IKM terendah adalah Kecepatan Pelayanan (72,50).

**Tabel 2.13**

Tingkat Kepentingan 9 Indikator Penilaian di Kecamatan Tambakboyo

Indikator Pelayanan	Rata-rata Kepentingan	Respon Responden
Persyaratan pelayanan	2.50	35
Prosedur pelayanan	2.55	33
Waktu pelayanan	2.84	38
Kompetensi pelaksana*	3.38	17
Perilaku pelaksana*	3.42	21
Biaya/tarif pelayanan*	3.43	9
Maklumat pelayanan*	3.58	12
Produk spesifikasi jenis pelayanan*	3.67	10
Penanganan pengaduan, saran, & masukan*	4.40	5

\*) Respon tidak mencukupi secara statistik (kurang dari 30 responden)

Analisa hasil survei juga menunjukkan tingkat kepentingan yang diperoleh dari rata-rata terhadap ranking kepentingan pada 9 indikator penilaian layanan. Pada saat survei, responden diminta untuk memilih 5 yang dianggap penting dari 18 sub indikator yang ada, kemudian memberikan ranking 1 sampai dengan 5 terhadap 5 indikator yang terpilih tersebut. Oleh karena itu, semakin kecil nilai rata-rata kepentingan yang terdapat pada Tabel 2.12 maka dianggap semakin penting dalam mempengaruhi kepuasan responden terhadap layanan Kecamatan Tambakboyo. Hasilnya menunjukkan 3 indikator terpenting dan dipilih oleh lebih dari 30 responden (syarat kecukupan data secara statistik) adalah Persyaratan pelayanan, Prosedur pelayanan, dan Waktu pelayanan. Sedangkan jika dari sub indikatornya, maka 3 sub indikator terpenting (Tabel 2.14) dan dipilih oleh lebih dari 30 responden (syarat kecukupan data secara statistik) adalah Kecepatan pelayanan, Persyaratan pengurusan layanan, dan Prosedur layanan.

**Tabel 2.14**

Tingkat Kepentingan 18 Sub Indikator Penilaian di Kecamatan Tambakboyo

Sub Indikator Pelayanan	Rata-rata Kepentingan	Respon Responden
Kemudahan mendapatkan informasi prosedur pelayanan*	2.31	29
Kesesuaian antara persyaratan dengan jenis layanan*	2.36	11
Kecepatan pelayanan	2.50	38
Persyaratan pengurusan layanan	2.63	35
Transparansi biaya pengurusan layanan*	2.67	9
Prosedur layanan	2.79	33
Ketetapan jadwal/waktu pelayanan dengan yang telah ditetapkan*	3.18	22
Tanggungjawab petugas dalam melayani*	3.21	14
Kewajaran biaya*	3.29	7
Keadilan petugas dalam melayani*	3.40	10
Variasi atau kelengkapan jenis layanan*	3.43	7
Kesopanan dan keramahan petugas dalam melayani*	3.43	21
Kedisiplinan petugas dalam melayani*	3.47	17
Kemampuan petugas dalam melayani*	3.47	15
Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani*	3.58	12
Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan*	3.90	10
Kesesuaian antara biaya yang anda bayar dengan biaya yang telah ditetapkan*	4.33	3
Kecepatan penanganan pengaduan/keluhan masyarakat*	4.40	5

\*) Respon tidak mencukupi secara statistik (kurang dari 30 responden)

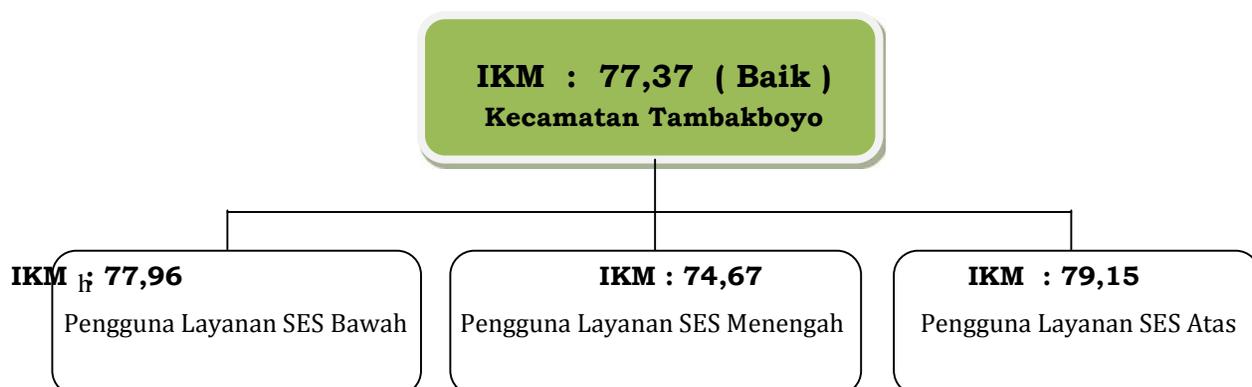
Gambar 2.13 berikut ini adalah IKM Kecamatan Tambakboyo menurut tingkat pendidikan responden. Semakin tinggi pendidikan seseorang membuatnya semakin kritis, dan hal itulah yang menjadi latar belakang nilai IKM semakin rendah seiring dengan semakin tingginya

pendidikan pengguna layanan di Kecamatan Tambakboyo. Nilai IKM responden berpendidikan SLTA sebesar 78,04 adalah yang paling tinggi sekaligus lebih tinggi dibandingkan IKM Kecamatan Tambakboyo secara keseluruhan (77,38). Sedangkan IKM responden berpendidikan diatas SLTA sebesar 75,60 dan yang paling rendah adalah IKM responden yang berpendidikan dibawah SLTA 77,74.



**Gambar 2.13**  
IKM Kecamatan Tambakboyo Menurut Tingkat Pendidikan Responden

Demikian pula ditunjukkan pada Gambar 2.15, adanya kecenderungan semakin tinggi SES seseorang membuatnya semakin kritis tidak berlaku di Kecamatan Tambakboyo karena 75% responden berada pada SES Bawah, hanya 20% responden saja yang berada pada SES Menengah, dan hanya 5% responden yang berada pada SES Atas. Nilai IKM responden dengan SES Atas (79,15) lebih tinggi dibandingkan IKM responden SES Menengah (74,67) maupun SES Bawah (77,96).



**Gambar 2.15**  
IKM Kecamatan Tambakboyo Menurut Tingkat SES

## INDIKATOR PENILAIAN TAMBAHAN

Pada survei dalam rangka Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2015, penilaian tidak hanya terhadap tingkat kepuasan layanan melainkan juga menilai beberapa indikator tambahan diantaranya:

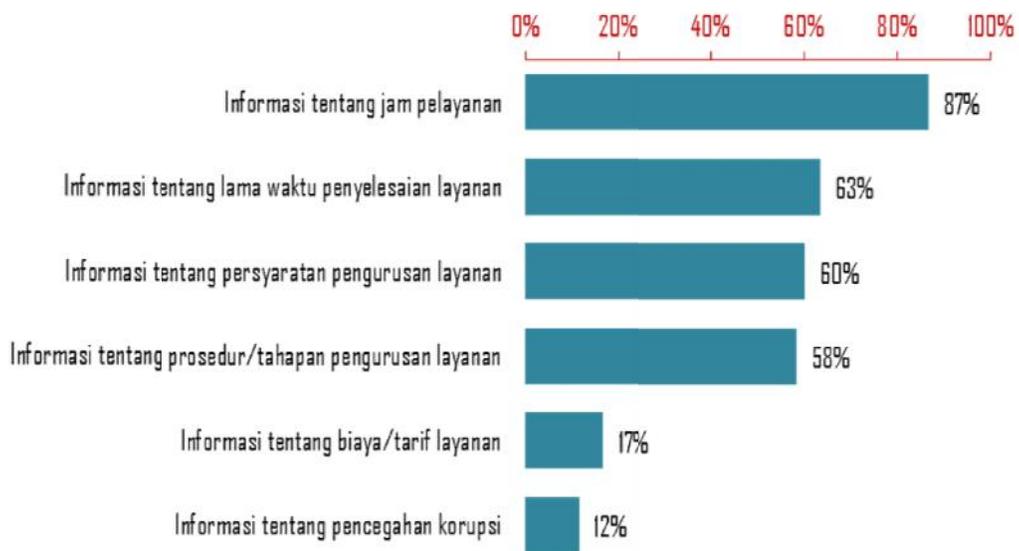
- Sarana, prasarana, dan atau fasilitas di tempat layanan;
- Sistem informasi pelayanan;
- Penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- Jumlah petugas layanan;
- Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- Komparasi penilaian antara pelayanan di Kecamatan Tambakboyo dengan pelayanan publik lain di lingkup Kabupaten Tuban.



**Gambar 2.15**

Kelengkapan & Kondisi Fasilitas di Tempat Pelayanan Kecamatan Tambakboyo

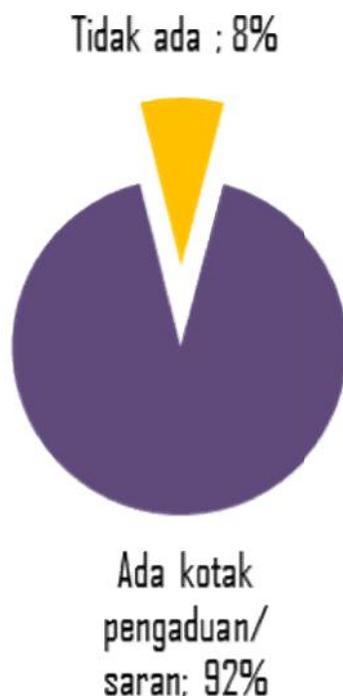
**Pertama**, tentang fasilitas di tempat layanan (Gambar 2.16). Sebagian besar responden (68%) menilai bahwa fasilitas di Kecamatan Tambakboyo sudah lengkap dan sebagian besar dalam kondisi baik. Namun demikian, ada fasilitas yang perlu diperbaiki seperti: kipas angin kurang, AC tidak nyala, loket kurang memadai, dan jumlah tempat duduk di ruang tunggu kurang. Sedangkan fasilitas yang belum ada atau dianggap perlu ditambah di tempat layanan adalah: mesin fotocopy, air minum, koran, ruang khusus menyusui, dan wifi.



**Gambar 2.16**

Kelengkapan Informasi di Tempat Pelayanan Kecamatan Tambakboyo

**Kedua**, tentang informasi layanan (Gambar 2.16). Salah satu bentuk transparansi layanan publik ditandai dengan keterbukaan informasi. Informasi terkait layanan seperti tentang prosedur/tahapan, persyaratan, pencegahan korupsi, jam pelayanan, biaya/tarif, dan lama waktu penyelesaian layanan sudah seharusnya disampaikan secara terbuka oleh Kecamatan Tambakboyo agar masyarakat pengguna layanan paham terhadap proses dan menghindari penyalahgunaan sekaligus menjaga integritas layanan. Beberapa informasi terkait pelayanan di Kecamatan Tambakboyo diketahui keberadaannya oleh responden. Belum banyak informasi penting yang terlihat oleh responden di tempat pelayanan. Baru informasi tentang jam pelayanan yang terlihat oleh hampir 90% responden. Sedangkan informasi tentang lama waktu penyelesaian layanan, persyaratan pengurusan layanan, prosedur/tahapan pengurusan layanan, biaya/tarif layanan, serta pencegahan korupsi hanya dilihat oleh tidak lebih dari 63% responden.



**Gambar 2.18**

Fasilitas Kotak Pengaduan/Saran di Tempat Pelayanan Kecamatan Tambakboyo

**Ketiga**, tentang kotak pengaduan/saran (Gambar 2.18). Kotak pengaduan/saran adalah salah satu fasilitas yang diharapkan dapat menjaring pengaduan masyarakat yang merasa tidak puas dengan layanan yang diperoleh demi perbaikan layanan. Mekanisme pengaduan masyarakat ini merupakan bagian dari pencegahan korupsi pada layanan publik. Dan hasil survei menunjukkan bahwa 92% responden mengetahui keberadaan kotak pengaduan/saran. Akan tetapi hanya 11%-nya saja yang pernah memanfaatkannya dan sebagian besar mengaku pengaduan/saran yang mereka sampaikan tidak pernah mendapatkan tanggapan.



**Gambar 2.18**

Jumlah Petugas di Tempat Pelayanan Kecamatan Tambakboyo

**Keempat**, tentang jumlah petugas (Gambar 2.18). Jumlah petugas sangat berpengaruh terhadap kecepatan proses penyelesaian layanan.

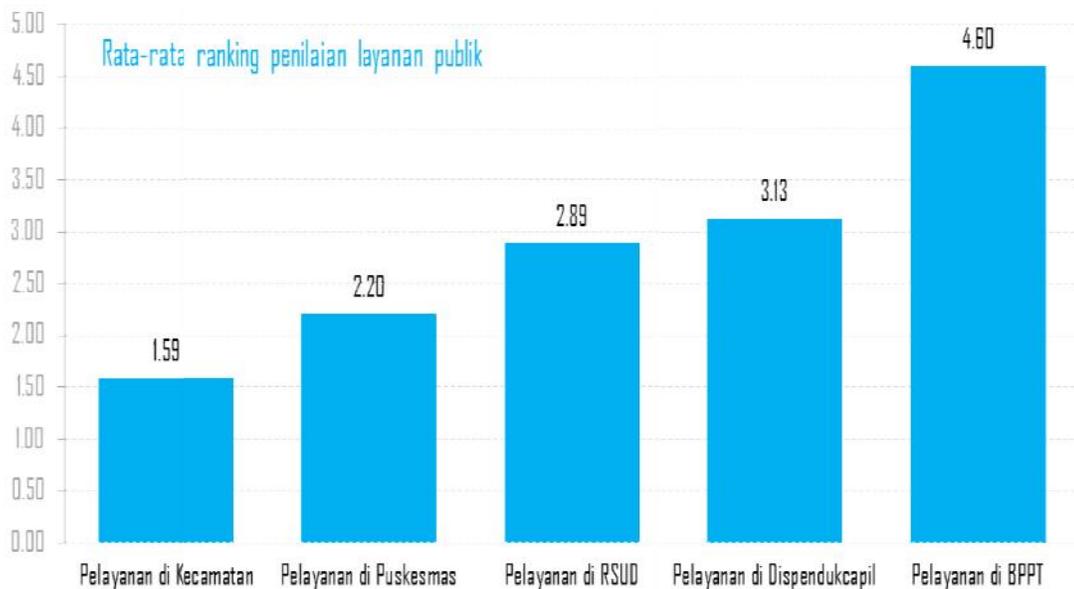
Disaat jumlah petugas sudah tidak sebanding dengan jumlah pengajuan pengurusan yang masuk di Kecamatan Tambakboyo, maka akan sangat rentan menimbulkan ketidakpuasan pengguna layanan terkait dengan kecepatan penyelesaian layanan, dan hal ini tentunya bukanlah hal yang diharapkan. Dan berdasarkan hasil survei, belum sepenuhnya dinilai mencukupi oleh pengguna layanan karena terdapat 20% responden yang menyatakan demikian.



**Gambar 2.20**

Kepastian Waktu Pelayanan di Tempat Pelayanan Kecamatan Tambakboyo

**Kelima**, tentang kepastian waktu pelayanan (Gambar 2.20). Kemampuan memberikan kepastian waktu penyelesaian layanan akan membuat masyarakat pengguna layanan yakin bahwa urusannya akan selesai tepat waktu. Dan berdasarkan hasil survei, ada 82% responden menyatakan petugas memberikan informasi kepastian waktu penyelesaian layanan tanpa ditanya terlebih dahulu oleh pengguna layanan, sedangkan 17% lainnya mengaku jika petugas baru memberikan kepastian saat ditanya. Bahkan 2% mengaku bahwa petugas tidak memberikan kepastian waktunya.



**Gambar 2.20**  
Persepsi Layanan Publik di Kabupaten Tuban

**Keenam**, tentang persepsi kualitas beberapa layanan publik di lingkup Kabupaten Tambakboyo (Gambar 2.20). Pada saat survei, responden diminta untuk memberikan ranking mulai dari yang dianggap terbaik hingga terburuk terhadap 5 layanan publik. Analisa ini bertujuan untuk mengkomparasi penilaian antara pelayanan di Kecamatan Tambakboyo dengan layanan publik lain di lingkup Kabupaten Tuban. Nilai yang diperoleh adalah berupa rata-rata terhadap ranking penilaian, sehingga semakin kecil nilai rata-rata rankingnya maka layanan publik tersebut dipersepsikan lebih bagus dibandingkan layanan publik lainnya. Hasilnya menunjukkan layanan di Kecamatan Tambakboyo memiliki rata-rata ranking sedang 1,39. Hal ini berarti bahwa layanan di Kecamatan Tambakboyo cukup baik dibandingkan layanan di Puskesmas, RSUD, Dispendukcapil, maupun BPPT.

### **2.3.3. Kinerja Pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintahan desa dan masyarakat**

Fungsi Kecamatan sebagai pembina dan pemberdayaan kepada Kelurahan dan Pemerintah Desa dan Masyarakat menurut :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan di Desa;
8. Peraturan Bupati Tuban Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2015 besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Standar Satuan Harga Swakelola di Desa Tahun Anggaran 2016;

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan kepada desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Tambakboyo maka perlu di tetapkan indikator kinerja utama. Beberapa indikator kinerja utama yang telah di tetapkan oleh Kecamatan Tambakboyo antara lain :

- a. Persentase Desa/Kelurahan Beradministrasi Baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes ;
- b. Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Beradministrasi Baik (LPMD/LPMK, PKK, Karang Taruna)
- c. Prosentase Desa/Kelurahan memiliki BUMDes
- d. Prosentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti;
- e. Indeks kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel Indikator Kinerja Utama

**Tabel 2.15**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	keterangan
1.	Persentase desa/kelurahan beradministrasi baik	%	100%	82%	88%	
2.	Persentase Lembaga	%	100%	76%	94%	

	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Beradministrasi baik				
3.	Jumlah Desa/Kelurahan Memiliki BUMDes	Nilai	18	-	16
4.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti	%	100%	62%	85%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100%	80%	82%

1. Tabel Persentase Desa/Kelurahan Beradministrasi Baik

**Tabel 2.16**

No	Kriteria	Satuan	Tahun 2016		Tahun 2017		keterangan
			Target	Realisasi	Target	realisasi	
1.	Persentase Desa/Kelurahan menyelenggarakan Pengelolaan administrasi Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan tentang desa/kelurahan	%	100%	82%	100%	88%	
2.	Prosentase desa/kelurahan telah mengisi buku administrasi keuangan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan	%	100%	72%	94%	88%	
3.	Prosentase desa/kelurahan telah menyusun dokumen perencanaan desa/kelurahan (RPJM Desa, RKP Desa) dengan kualitas baik	%	100%	82%	100%	94%	

2. Tabel persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Beradministrasi Baik (LPMD,LPMK,Karang Taruna, PKK)

**Tabel 2.18**

No	Kriteria	Satuan	Tahun 2016		Tahun 2017		keterangan
			Target	Realisasi	Target	realisasi	
1.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan	%	100%	76%	100%	82%	

	Desa/Kelurahan menyelenggarakan Pengelolaan administrasi sesuai dengan ketentuan						
2.	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan telah mengisi buku administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan	%	100%	71%	94%	88%	
3.	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan telah menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik	%	100%	88%	100%	94%	

3. Prosentase Desa/Kelurahan memiliki BUMDes

Dari 18 desa yang ada di wilayah Kecamatan Tambakboyo baru ada 12 yang memiliki BUMDes mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang.

4. Tabel persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti

**Tabel 2.18**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	keterangan
1.	Persentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti	%	100%	62%	85%	

### 2.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Tantangan pengembangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tambakboyo kedepan adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumberdaya manusia baik secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas ditandai dengan jumlah perangkat yang ada kurang memadai (dapat dilihat dari perbandingan prosentase jumlah jabatan struktural dan fungsional). Dari tabel tersebut, prosentase jabatan struktural lebih besar dari fungsional (staf) yakni 60% berbanding 40%, idealnya prosentase jabatan struktural harus lebih kecil dari fungsional. Secara kualitas dapat dilihat dari perbandingan tingkat pendidikan, mayoritas (46%) latar belakang pendidikan Sarjana, (45%) latar belakang pendidikan SLTA dan (3%) hanya mengenyam pendidikan SD dan SLTP;

2. Keterbatasan alokasi anggaran SKPD.

Anggaran merupakan komponen penting yang menentukan tingkat sukses atau tidaknya pelaksanaan berbagai tugas dan kegiatan. Sementara kalau dilihat dari tabel anggaran dan realisasi, jumlah yang diterima SKPD Kecamatan Tambakboyo cukup besar dengan nilai milyar-an rupiah. Namun

demikian 90% dari alokasi anggaran tersebut merupakan belanja tidak langsung untuk membiayai gaji dan tunjangan PNS. Sedangkan belanja langsung untuk membiayai program dan kegiatan hanya 10% dan itupun hanya bersifat belanja rutin operasional kantor.

3. Semakin kritisnya pemikiran masyarakat Kecamatan Tambakboyo sebagai dampak dari reformasi perbaikan kondisi sosial ekonomi akibat industrialisasi yang telah tumbuh pesat. Kondisi tersebut menuntut pemerintah kecamatan untuk berbenah dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Keterbatasan sarana pendukung kegiatan;
5. Berada dekat dengan pemerintahan Kabupaten Tambakboyo yang merupakan kota industri dan perdagangan. Dampaknya tingkat kriminalitas juga cukup tinggi. Data tingkat kriminalitas dapat dilihat pada table 2.19 dibawah ini :

**Tabel 2.19**

Tahun	Jumlah tindak kriminal	Perbandingan	
		Jumlah	%
2013	52		
2014	41	-11	-26,83%
2015	57	16	28,07%
Rata-rata	98,00	5,0	5,10%

Sumber data : Polsek Tambakboyo

6. Memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi yaitu 3.983 orang/M<sup>2</sup> yang tentunya berpengaruh kepada tingkat kesulitan pelaksanaan program dan kegiatan. Data perkembangan penduduk dapat dilihat pada tabel 2.20dibawah ini :

**Tabel 2.20**

Tahun ke	Jumlah penduduk		Perbandingan		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah	%
1	39.607	41.682	81.289		

2	40.723	41.585	82.308	1.019	1,24%
3	41.240	41.887	83.127	819	0,99%
4	42.688	43.978	86.666	3.539	4,08%
5	42.254	43.770	86.024	(642)	-0,75%

Sumber Data : Kantor Badan Pusat Statistik Kab.Tambakboyo

Sedangkan peluang pengembangannya adalah sebagai berikut :

1. Adanya landasan hukum SOTK pemerintah kecamatan dan kelurahan;
2. Adanya hubungan kerja dengan unsur Muspika dan Instansi Vertikal;
3. Kondisi sosial budaya masyarakat yang cukup baik dengan nilai IPM tertinggi di Kabupaten Tuban;
4. Posisi geografis Kecamatan Tambakboyo yang strategis berada di pusat pemerintahan Kabupaten Tuban;
5. Industrialisasi yang berkembang pesat di Kabupaten Tuban.

#### **2.4.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan**

Pelaksanaan penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah antara lain adalah :

1. Kerjasama antar daerah;
2. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
3. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
4. Pembinaan batas wilayah;
5. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
6. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
7. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

##### **2.4.1.1 Tantangan pengembangan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan**

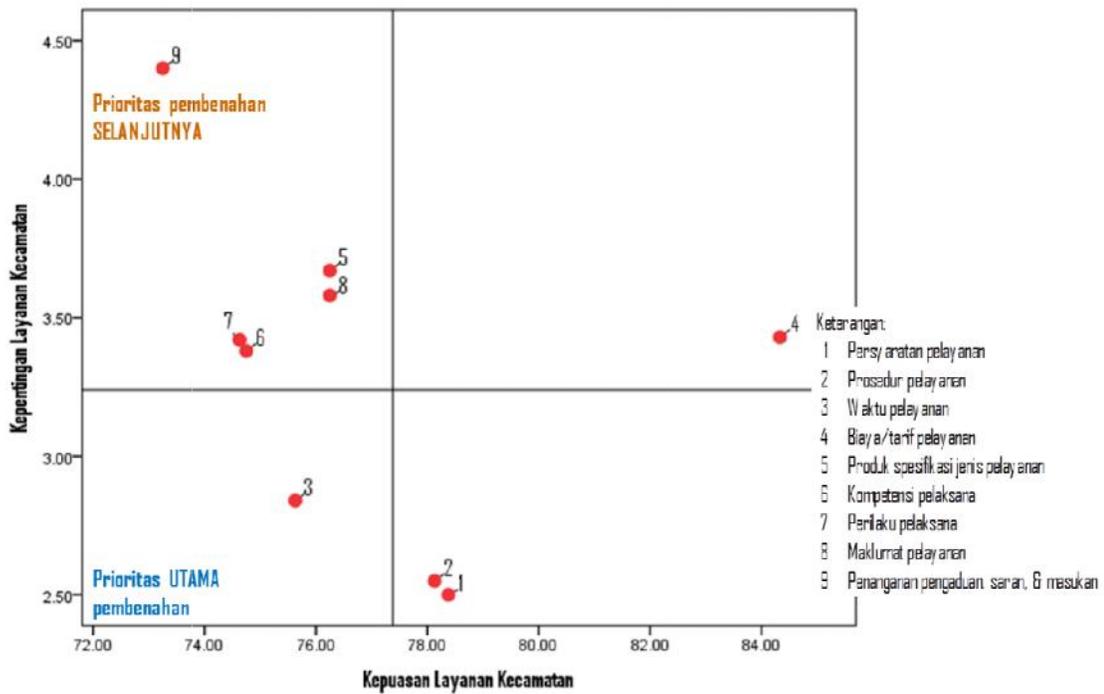
1. Terbatasnya jumlah aparat/pegawai/perangkat di kecamatan dan desa/kelurahan di bandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani;
2. Masih rendahnya kualitas aparatur pemerintah Desa/Kelurahan dalam implemintasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Kewenangan dan dana yang di berikan oleh Pemerintah Daerah Kepada Kecamatan;
4. Cakupan wilayah dan karakteristik masyarakat perkotaan yang heterogen;
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
6. Masih tingginya angka kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta pengangguran

#### **2.4.1.2 Peluang Pengembangan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan**

1. Luas wilayah serta potensi yang dapat di kembangkan;
2. Kewenangan dan dana besar yang di berikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kecamatan;
3. Semakin meningkatnya penegakan hukum di segala bidang;
4. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang transparan, partisipatif dan akuntabel;
5. Dinamika pembangunan di perkotaan dan pedesaan yang pesat dan kompleks.

#### **2.4.2. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik Kepada Masyarakat**

Dalam menentukan prioritas pembenahan kinerja yang harus dilakukan, digunakan pendekatan melalui diagram yang menggambarkan tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan secara bersama-sama, sehingga dapat menunjukkan indikator mana saja yang mendapatkan prioritas utama untuk dibenahi ataupun ditingkatkan kinerjanya karena memiliki tingkat kepentingan tinggi namun tingkat kepuasannya rendah.



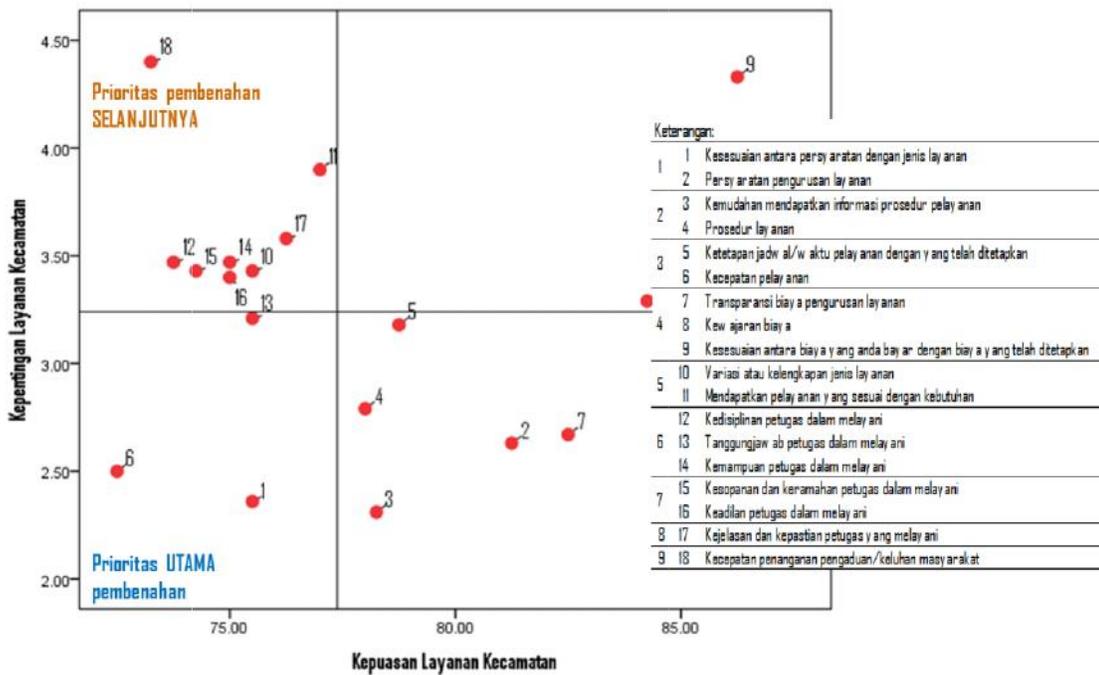
**Gambar 2.21**  
Prioritas Pembenahan Kinerja – Indikator

Pada gambar prioritas pembenahan kinerja Kecamatan Tambakboyo (Gambar 2.21) terdapat 1 indikator pelayanan yang masuk dalam kuadran prioritas utama pembenahan, yaitu:

1. Waktu pelayanan

Sedangkan pada kuadran prioritas pembenahan selanjutnya, terdapat 5 indikator pelayanan namun semuanya memiliki respon kepentingan tidak mencukupi (< 30 responden) sehingga hanya dapat digunakan sebagai indikasi dan belum bisa menjadi alat untuk mengambil keputusan. Kelima indikator tersebut adalah:

1. Kompetensi pelaksana
2. Perilaku pelaksana
3. Maklumat pelayanan
4. Produk spesifikasi jenis pelayanan
5. Penanganan pengaduan, saran, & masukan



**Gambar 2.23**  
Prioritas Pembenahan Kinerja – Sub Indikator

Pada Gambar 2.23 terdapat 3 sub indikator pelayanan yang masuk dalam kuadran prioritas utama pembenahan, namun terdapat 2 sub indikator yang memiliki respon kepentingan tidak mencukupi (< 30 responden) sehingga sub indikator yang masuk dalam prioritas utama pembenahan adalah sbb:

1. Kecepatan pelayanan
2. Kesesuaian antara persyaratan dengan jenis layanan
3. Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan

Sedangkan pada kuadran prioritas pembenahan selanjutnya, terdapat 8 sub indikator pelayanan namun semuanya memiliki respon kepentingan tidak mencukupi (< 30 responden) sehingga hanya dapat digunakan sebagai indikasi dan belum bisa menjadi alat untuk mengambil keputusan. Sub indikator tersebut adalah:

1. Kedisiplinan petugas dalam melayani
2. Kesopanan dan keramahan petugas dalam melayani
3. Keadilan petugas dalam melayani
4. Kemampuan petugas dalam melayani
5. Variasi atau kelengkapan jenis layanan
6. Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani
7. Mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan
8. Kecepatan penanganan pengaduan/keluhan masyarakat

### **2.4.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja Pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintahan desa dan masyarakat**

Kecamatan Tambakboyo dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya dalam pengembangan Kinerja Pembinaan dan Pemberdayaan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan kedepan yang akan dihadapi baik itu tantangan dan permasalahan dari internal maupun external Kecamatan Tambakboyo sendiri, akan tetapi permasalahan dan tantangan tersebut harus dihadapi dan kita anggap sebagai tantangan untuk menjadikan Kecamatan Tambakboyo secara umum dan Desa/Kelurahan secara khusus menjadi lebih baik dalam rangka pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat.

#### **2.4.3.1 Tantangan Pengembangan Kinerja pembinaan dan pemberdayaan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat antara lain :**

1. Belum siapnya khususnya penyelenggara Pemerintahan Desa dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Masih rendahnya kualitas aparatur pemerintah desa dan kelurahan dalam implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Rendahnya kualitas SDM Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Besarnya jumlah keluarga miskin di desa/kelurahan;
5. Banyaknya infrastruktur desa dan kelurahan yang rusak dan belum memadai;
6. Tingkat partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan dalam dalam pelaksanaan pembangunan yang belum optimal.

#### **2.4.3.2 Peluang Pengembangan kinerja pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintahan desa/kelurahan dan masyarakat**

1. Terbitnya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju pembangunan desa yang mandiri;
2. Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;

3. Adanya partisipasi pemerintahan desa dan kelurahan serta kelembagaan dalam pembangunan di desa/kelurahan;
4. Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintah desa dan masyarakat;
5. Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
6. Banyaknya potensi di desa/kelurahan yang dapat di kembangkan;
7. Tersedianya anggaran.

## **BAB III.**

### **Isu-Isu strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tambakboyo**

Berdasarkan informasi gambaran pelayanan Kecamatan Tambakboyo di Bab terdahulu, berikut ini adalah hasil identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tambakboyo :

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel;
2. Tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan yang lebih baik;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan UU Desa;
4. Penanganan persoalan sosial (pemberantasan narkoba, gender, kenakalan remaja judi dll) yang belum optimal;
3. Penurunan angka kemiskinan belum signifikan;
4. Potensi wilayah belum tergarap dengan baik.

#### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

Mengacu pada Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambakboyo Tahun 2016-2021, dapat disampaikan hal – hal sebagaimana berikut :

***“ Visi Kabupaten Tuban 2016-2021; “Kabupaten Tuban yang lebih religius, bersih, maju dan sejahtera”.***

Dengan penjelasan sebagai berikut:

##### **Religius**

yaitu kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan

kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia yang berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.

### **Bersih**

Sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang transparan, akuntabilitas dan mampu memberikan *satisfied public services* (layanan publik yang memuaskan) guna meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat dan pasti

### **Maju**

Ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia.

Maju yang dimaksud adalah kondisi daerah yang dinilai berdasarkan berbagai indikator, yaitu: indikator sosial, ekonomi, hukum, dan politik.

1. Indikator sosial yang digunakan untuk mengukur kemajuan adalah pada kualitas sumber daya manusia dan kependudukan. Kualitas sumber daya manusia berhubungan dengan Indeks Pembangunan Manusia yang terdiri dari tiga komponen, yaitu: kualitas pendidikan, derajat kesehatan, dan daya beli. Selain itu, Kabupaten Tuban yang maju masyarakatnya juga didukung oleh kepribadian dan berakhlak mulia. Sedangkan kependudukan erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali, pemerataan pembangunan, dan pelayanan sosial yang lebih baik;
2. Indikator ekonomi dapat menggambarkan kemajuan Kabupaten Tambakboyo yang tercermin melalui tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Lembaga ekonomi juga tertata dan berfungsi dengan baik sehingga mendukung perekonomian dengan optimal. Selain itu, daerah yang maju juga ditandai dengan perekonomian yang stabil;
3. Kemajuan Kabupaten Tuban juga ditandai dengan jaminan hukum dan penyelenggaraan politik yang baik serta mantap. Masyarakat

yang maju ditandai dengan tingginya partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, maupun dalam hukum. Selain itu juga terdapat pemenuhan hak-hak masyarakat, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupannya. Pencapaian Kabupaten Tuban yang maju juga didukung oleh suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang baik (*clean government*), sehingga dapat menjalankan pelayanan prima (*excellent service*) kepada publik.

### **Sejahtera**

Dalam istilah umum sejahtera menunjuk ke *keadaan yang baik*, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjukkan jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan misi :

1. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama;
2. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang kreatif dan bersih;
3. Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan;
4. Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan.

Program – program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2016-2021 adalah sebagaimanaberikut :

**Misi 1: Peningkatan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan dengan mengutamakan toleransi dan kerukunan antar umat beragama**

Pembangunan diarahkan pada terwujudnya masyarakat yang berahlak mulia, tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya luhur, toleransi dan kerukunan antar umat beragama dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, etika pembangunan serta mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pelayanan kehidupan beragama.

**Program Prioritas :**

1. Peningkatan peran lembaga/tokoh agama, pendidikan keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan kemasyarakatan;
2. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Peningkatan kualitas keberagaman dan kerukunan umat beragama melalui peningkatan kapasitas lembaga keagamaan dan forum komunikasi lintas agama.

**Program unggulan :**

1. Peningkatan sarana prasana peribadatan, TPQ dan lembaga keagamaan lainnya beserta sumberdaya penunjangnya

**Misi 2 : Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang baik, kreatif dan bersih**

**Program Prioritas:**

1. Implementasi E - Government, kedalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
2. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengembangan sumber pembiayaan alternatif lainnya
3. Peningkatan kualitas SDM aparatur

**Program unggulan:**

- Perbaiki sistem remunerasi tambahan penghasilan PNS berdasarkan kinerja secara bertahap;
- Peningkatan profesionalitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional secara bertahap;
- Peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis pada indeks kepuasan masyarakat dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- Peningkatan komunikasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat serta peningkatan akses dan distribusi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat;
- Peningkatan pembangunan pengembangan jaringan telekomunikasi berbasis teknologi informasi (**smart city**)
- Peningkatan kinerja pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- Peningkatan kreatifitas dan inovasi aparatur untuk mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik;
- Peningkatan peranserta masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan.

**Misi 3: Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan dan optimalisasi penataan ruang guna mendorong kemajuan daerah****Program Prioritas :**

1. Peningkatan pembangunan prasarana sarana umum (PSU) utamanya ketersediaan perumahan, sanitasi, jaringan drainase dan pelayanan persampahan melalui kerjasama dengan swasta dan masyarakat.
2. Peningkatan pembangunan lingkungan dan pelestarian sumber daya hayati melalui pemantapan regulasi dan manajemen kelembagaan.

**Program unggulan:**

- Gerakan penanaman sejuta pohon dan pengembangan biopori
3. Penyediaan dan pengelolaan air baku, konservasi sungai dan sumber daya air lainnya
  4. Pemantapan sistem tanggap darurat bencana terpadu antara pemerintah, masyarakat dan swasta

**Program unggulan:**

- Mewujudkan Desa Tangguh Bencana
5. Pengendalian banjir

**Program unggulan:**

- Pembangunan / Normalisasi Sungai dan Saluran Air.
6. Pengendalian pemanfaatan ruang
  7. Evaluasi penataan ruang yang disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi

**Misi 4 :Membangun struktur ekonomi daerah yang kokoh berlandaskan keunggulan lokal yang kompetitif**

**Program Prioritas :**

8. Peningkatan produktifitas sektor pertanian

**Program unggulan:**

- Revitalisasi pertanian dari hulu sampai hilir
  - Peningkatan sarana prasarana produksi pertanian
  - Peningkatan layanan dan keandalan waduk, jaringan irigasi dan pompanisasi pertanian
  - Peningkatan pembangunan jalan usaha tani
  - Pemanfaatan teknologi pengolahan pasca panen
  - Pengembangan populasi ternak dan sentra peternakan
  - Percepatan pengembangan kawasan minapolitan
  - Peningkatan produksi perikanan
9. Peningkatan nilai tambah potensi unggulan daerah;
  10. Peningkatan pembangunansektor industri manufaktur, industri besar dan industri kecil menengah;
  11. Peningkatan dan pemantapan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka penguatan konektivitas antar wilayah yang merata dan seimbang;

**Program unggulan:**

- Pembangunan Jalan Lingkar Kota
12. Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi;
  13. Peningkatan pembangunan sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  14. Peningkatan kewirausahaan UMKM, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan sektor informal;
  15. Peningkatan ketahanan pangan;
  16. Peningkatan kinerja perdagangan yang efisien dan dinamis;
  17. Peningkatan pembangunan kepariwisataan berbasis budaya lokal melalui pemberdayaan masyarakat, kerjasama investasi dan pengembangan destinasi wisata beserta fasilitas pendukungnya;

**Program unggulan:**

- Pembangunan dan Pengembangan Wisata, Wisata Religi dan Wisata Alam;
  - Pengembangan desa wisata kerajinan dan wisata agro
18. Peningkatan kinerja investasi dan pelayanan perijinan penanaman modal melalui PTSP;
  19. Pengembangan potensi ekonomi kreatif;
  20. Pengendalian pemanfaatan sektor pertambangan dan energy.

**Misi 5 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan**

Pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar dan kesehatan, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, peningkatan sarana prasarana olah raga dan peningkatan peran serta dan kreatifitas pemuda, peningkatan penciptaan dan perluasan kesempatan kerja.

**Program Prioritas :**

1. Pemenuhan hak penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas melalui program peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dasar.

**Program Unggulan:**

- Program pendidikan gratis 9 tahun bagi warga miskin “*sekolah itu mudah*”
2. Peningkatan budaya baca masyarakat melalui fasilitasi layanan perpustakaan daerah dan desa
  3. Peningkatan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan dan teknologi
  4. Peningkatan gizi dan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan akses dan kemudahan pelayanan kesehatan.

**Program Unggulan:**

- Peningkatan Sistem Jaringan Kesehatan Masyarakat; dan
  - Peningkatan jumlah dan kualitas Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.
5. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan PMKS menuju kualitas hidup yang lebih layak dan sehat

**Program unggulan:**

- Pembangunan rumah tidak layak huni, jamban keluarga
  - Desa berstatus ODF (Open Defecation Free) desa berstatus bebas dari buang hajat sembarangan
6. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan dan penguatan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak utamanya trafficking dan kekerasan terhadap anak;
  7. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pedesaan;
  8. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang produktif, berketrampilan dan berkeahlian.

**Program Unggulan:**

- Peningkatan akses, kualitas tenaga kerja dan fasilitasi pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan menuju Tambakboyo bebas masalah Ketenagakerjaan (Full Employment) dengan kerjasama Pihak Sekolah Kejuruan, Perguruan Tinggi dan pelaku usaha (swasta).
9. Peningkatan partisipasi pemuda dan olah raga melalui pengembangan prestasi dan wirausaha

**Program unggulan :**

- Pembangunan Sport Center

**3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

- Tidak ada –

**3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

- Tidak ada \_

**3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.**

Berdasarkan pada analisa data-data yang ada terkait serta berdasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tambakboyo 2016-2021 maka dapat ditentukan isu-isu strategis di Kecamatan Tambakboyo berdasarkan tugas dan fungsi :

**1. Isu Strategis Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih**

Adanya era otonomi daerah dimulai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diperbarui dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 serta diperbarui lagi dengan Undang-undang no. 23 tahun 2014 menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan perannya dalam menyongsong pembangunan daerah yang lebih memperhatikan potensi dan keunggulan lokal. Semangat otonomi daerah salah satunya adalah perbaikan kinerja birokrasi dalam rangka **peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat.** Untuk itu perlu perbaikan yang menyeluruh (komprehensif) baik meliputi sistem administrasi pemerintahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penggunaan teknologi informasi yang dikenal sebagai *electronic government (E-Government)* dalam sektor publik.

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi Kecamatan Tambakboyo**

##### **VISI :**

TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DAN PELAKSANAAN SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DI KECAMATAN TAMBAKBOYO PADA TAHUN 2021

##### **PENJABARAN VISI**

Rumusan Visi Kecamatan Tambakboyo secara rinci mengandung kata-kata kunci sebagai berikut :

- Kecamatan Tambakboyo adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Tuban Jawa Timur;
- Optimalisasi mengandung makna menjadi paling baik, menjadikan paling tinggi, paling prima dan sebagainya;
- Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan Instansi Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Profesional mengandung arti *good governance* (supremasi hukum, akuntabilitas, partisipatif, transparansi, kesetaraan) Meningkatkan kemampuan SDM aparat kecamatan dan Desa agar memahami SOP serta Perundang Undangan yang berlaku;
- Tugas umum pemerintahan adalah meliputi :
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;

- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa.
- Sebagian urusan otonomi adalah sebagian urusan otonomi yang telah dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tuban No. 52 Tahun 2012, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan.

#### **MISI :**

1. Mewujudkan pelayanan publik prima;
2. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Tambakboyo secara efektif, transparan dan akuntabel.

#### **4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tambakboyo**

Dengan membreak down Misi 2 Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Misi ke 2 : **Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kreatif dan bersih.**

#### **TUJUAN**

Tujuan misi 1 (Mewujudkan pelayanan publik prima)

- Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Tambakboyo dan Kelurahan;
- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di Kecamatan Tambakboyo;

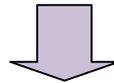
Tujuan misi 2 (Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Tambakboyo secara efektif, transparan dan akuntabel)

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja;

Misi ke 2 Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 :  
Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik,  
kreatif dan bersih

**Tabel 2.21**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
<b>Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik</b>	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan	Nilai AKIP
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public	Nilai IKM terhadap kinerja pelayanan publik Pemerintah Daerah
		Persentase Desa dengan tata kelola baik



Visi Kecamatan Tambakboyo : ***terwujudnya optimalisasi pelayanan publik yang profesional dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan sebagian urusan otonomi di kecamatan Tambakboyo pada tahun 2021***

Misi Kecamatan Tambakboyo : ***Meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan Tambakboyo secara efektif, transparan dan akuntabel.***

Tabel 2.22

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Nilai AKIP Kecamatan	CC	B	B	BB	A
2	Meningkatkan KualitasKeamanan dan Ketertiban	Meningkatnya kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat kecamatan Tambakboyo	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
3	Meningkatkan Pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintahan desa dan masyarakat	Meningkatnya kualitas pemberdayaan kepada pemerintahan desa dan masyarakat	Prosentase Desa beradministrasi Baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes	60	70	80	90	100
			Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan adminstrasi baik	60	70	80	90	100
4	Meningkatkan Pelayanan Publik kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
5	Meningkatkan ekonomi lembaga masyarakat desa dan kelurahan	Meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi masyarakat desa	Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan	1	3	3	3	3

## 4.2. Strategi dan Kebijakan

**Tabel 2.23**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Nilai AKIP Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Peningkatan kinerja Pemerintahan
Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban	Meningkatnya kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat kecamatan Tambakboyo	Jumlah Pelanggaran masyarakat yang ditindaklanjuti	Meningkatnya Kualitas keamanan dan ketertiban Masyarakat	Peningkatan Keamanan dan ketertiban masyarakat
Meningkatkan Pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintahan desa dan masyarakat	Meningkatnya kualitas pemberdayaan kepada pemerintahan desa dan masyarakat	Prosentase Desa beradministrasi Baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes	Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Pelayanan Masyarakat	Penataan Kelembagaan dan peningkatan kualitas Aparatur secara efektif
		Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan administrasi baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerja sama desa
Meningkatkan Pelayanan Publik kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan Tambakboyo	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Pelayanan Masyarakat	Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik
Meningkatkan ekonomi Lembaga Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya kualitas kelembagaan ekonomi masyarakat desa	Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan	Prosentase desa memiliki BUMDes	Peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat desa

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

#### **5.1 .Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan**

Penjabaran arah dari keseluruhan perencanaan tersebut dituangkan dalam bentuk rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan sebagai berikut :

##### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- d. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- e. Penyediaan Jasa administrasi Keuangan;
- f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- g. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
- j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- l. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

##### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :**

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- e. Belanja Modal Pengadaan Meubelair;
- f. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan dan Perlengkapan Gedung Kantor;
- g. Rehab sedang/berat Gedung Kantor.

- 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi kegiatan :**
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;
  - b. Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur Pemerintah Daerah;
- 4. Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD, meliputi kegiatan :**
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
  - c. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
  - d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 5. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa**
  - a. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa.
  - b. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa;
  - c. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.
- 6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa**
  - a. Lomba Desa;
  - b. Operasional RT/RW di Kelurahan;
  - c. Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan RT/RW.
- 7. Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa**
  - a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
  - b. Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa.
- 8. Program Peningkatan Kualitas Perijinan**
  - a. Operasional Pelaksanaan Perijinan di Tingkat Kecamatan.
- 9. Program Pembinaan Kemasyarakatan**
  - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakatan;
  - b. Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah.

## Program Per Sasaran

**Tabel 2.24**

No	Program
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan kelurahan	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan (TUP) kecamatan.	
2.1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2.2	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja	
3.1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah

## Misi

**Tabel 2.25**

No	Misi
1	Mewujudkan Pelayanan Publik Prima
2	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kecamatan Tambakboyo Secara Efektif, Transparan dan Akuntabel

## Tujuan

**Tabel 2.26**

No	Tujuan
Misi 1 : Mewujudkan Pelayanan Publik Prima	
1.1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan dan Desa se-Kecamatan Tambakboyo.
1.2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan.
Misi 2 : Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kecamatan Tambakboyo Secara Efektif,Transparan dan Akuntabel	
2.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja

## Sasaran

**Tabel 2.27**

No	Sasaran
Tujuan 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan dan Desa se-Kecamatan Tambakboyo.	
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan Desa
Tujuan 2 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan.	
2.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan (TUP) kecamatan.
Tujuan 3 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja	
3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Indikator Sasaran

**Tabel 2.28**

No	Indikator Kinerja	Satuan	IKU
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan Desa			
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,17	✓
1.2	Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Admnistratif yang Ditindaklanjuti	100 %	✓
1.3	Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI		
Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan (TUP) kecamatan.			
2.1	Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP & KK) Tepat Waktu	100 %	✓
2.2	Prosentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu	100 %	✓
2.3	Prosentase Desa Yang Memenuhi Standar Kriteria Baik	33,33 %	✓
2.4	Prosentase RW Juara	%	✓
2.5	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100 %	✓
2.6	Rasio Anggota Linmas	1 : 3	
Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja			
3.1	Nilai AKIP Kecamatan Tambakboyo	B	
3.2	Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	100 %	

Target Indikator Sasaran

**Tabel 2.29**

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	79	80	81	82
1.2	Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Administratif yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
1.3	Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI	-	800	860	870	900
2.1	Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP & KK) Tepat Waktu	90	90	100	100	100
2.2	Prosentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu	90	90	100	100	100
2.3	Prosentase Desa Yang Memenuhi Standar Kriteria Baik	33,33	66,67	100	100	100
2.4	Prosentase RW Juara	-	60	75	75	80
2.5	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	-	60	80	80	80
2.6	Rasio Anggota Linmas	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3
3.1	Nilai AKIP Kecamatan Tambakboyo	50	60	63	65	70
3.2	Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

Program Per Sasaran

**Tabel 2.30**

No	Program
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan Desa	
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.6	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan (TUP) kecamatan.	
2.1	Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Desa
2.2	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja	
3.1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3.2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Misi

**Tabel 2.31**

No	Misi
1	Mewujudkan Pelayanan Prima
2	Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kecamatan Tambakboyo Secara Efektif, Transparan dan Akuntabel

## Tujuan

**Tabel 2.32**

No	Tujuan
Misi 1 : Mewujudkan Pelayanan Prima	
1.1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan dan Desa se-Kecamatan Tambakboyo.
1.2	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan.
Misi 2 : Meningkatkan Kinerja Pemerintah Kecamatan Tambakboyo Secara Efektif, Transparan dan Akuntabel	
2.1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja

## Sasaran

**Tabel 2.34**

No	Sasaran
Tujuan 1 : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan dan Desa se-Kecamatan Tambakboyo.	
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan 61riter kecamatan dan Desa
Tujuan 2 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan.	
2.1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan (TUP) kecamatan.
Tujuan 3 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja	
3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja

Indikator Sasaran

**Tabel 2.35**

No	Indikator Kinerja	Satuan	IKU
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan Desa			
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	✓
1.2	Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Admnistratif yang Ditindaklanjuti	100 %	✓
1.3	Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI	.....	
Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan (TUP) kecamatan.			
2.1	Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP & KK) Tepat Waktu	100 %	✓
2.2	Prosentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu	100 %	✓
2.3	Prosentase Desa Yang Memenuhi Standar Kriteria Baik	33,33 %	✓
2.4	Prosentase RW Juara	%	✓
2.5	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100 %	✓
2.6	Rasio Anggota Linmas	1 : 3	
Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja			
3.1	Nilai AKIP Kecamatan Tambakboyo	B	
3.2	Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	100 %	

Target Indikator Sasaran

**Tabel 2.36**

No	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021
1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	79	80	81	82
1.2	Prosentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Admnistratif yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
1.3	Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI	-	980	860	870	900
2.1	Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan (KTP & KK) Tepat Waktu	90	90	100	100	100
2.2	Prosentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu	90	90	100	100	100
2.3	Prosentase Desa Yang Memenuhi Standar Kriteria Baik	33,33	66,67	100	100	100
2.4	Prosentase RW Juara	-	37.50	75	75	80
2.5	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	-	60	80	80	80
2.6	Rasio Anggota Linmas	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3	1 : 3
3.1	Nilai AKIP Kecamatan Tambakboyo	50	60	63	65	70
3.2	Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100

## **5.2 Indikator Kinerja**

1. Nilai AKIP Kecamatan;
2. Prosentase Pengaduan Masyarakat yang di tindaklanjuti;
3. Persentase Desa/Desa Beradministrasi Baik;
4. Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Desa Beradministrasi Baik (LPMD/LPMK, PKK, Karang Taruna);
5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan;
6. Jumlah BUMDes pada tingkat Kecamatan

## **5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Idikatif**

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan;
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja;
4. Meningkatnya kualitas pemberdayaan kepada pemerintahan desa dan masyarakat.

**Tabel 2.37 Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Tahun 2016-2021**  
**INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KECAMATAN TAMBAKBOYO**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD ( Tahun ke V )			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Nilai AKIP Kecamatan		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka Indeks Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	79	138,600,000	80	55,440,000	80	36,960,200	80	27,720,000	80	55,440,000	80	175,560,200		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar (surat)		3500	34,000,000	3500	37,400,000	3550	41,140,000	3600	45,254,000	3650	49,779,400	17800	207,573,400		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (jenis)		3	194,400,000	3	213,840,000	3	235,224,000	3	258,746,400	3	284,621,040	15	1,186,831,440		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Tahun)		1	56,000,000	1	61,600,000	1	67,760,000	1	74,536,000	1	81,989,600	5	341,885,600		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD ( Tahun ke V )			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (unit)		86	9,250,000	86	10,175,000	86	11,192,500	86	12,311,750	86	13,542,925	430	56,472,175		
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan (orang)		38	201,300,000	38	221,430,000	38	243,573,000	38	267,930,300	38	294,723,330	190	1,228,956,630		
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (orang)		37	540,000,000	37	594,000,000	37	653,400,000	37	718,740,000	37	790,614,000	185	3,296,754,000		
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (Tahun)		1	99,000,000	1	108,900,000	1	119,790,000	1	131,769,000	1	144,945,900	5	604,404,900		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan (Tahun)		1	86,200,000	1	94,820,000	1	104,302,000	1	114,732,200	1	126,205,420	5	526,259,620		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Tahun)		1	29,700,000	1	32,670,000	1	35,937,000	1	39,530,700	1	43,483,770	5	181,321,470		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD ( Tahun ke V )			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis bacaan)		3	37,200,000	3	40,920,000	3	45,012,000	3	49,513,200	3	54,464,520	15	227,109,720		
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan (Tahun)		1	21,326,000	1	22,480,000	1	23,528,000	1	25,080,800	1	268,288,880	5	570,702,680		
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang diikuti (Tahun)		1	6,100,000	1	7,767,000	1	8,743,700	1	10,918,070	1	12.309,877	5	45,837,647		
				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase Sarana dan Prasarana yang Layak Fungsi (%)</b>	<b>97</b>	<b>95</b>	<b>39,200,000</b>	<b>80</b>	<b>41,000,000</b>	<b>80</b>	<b>42,870,000</b>	<b>80</b>	<b>43,857,000</b>	<b>80</b>	<b>90,042,700</b>	<b>80</b>	<b>625,969,700</b>		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas yang dipelihara (unit)		1	5,000,000	1	5,500,000	1	6,050,000	1	6,655,000	1	7,320,500	5	30,525,500		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD ( Tahun ke V )			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor (unit)		5	39,200,000	5	52,000,000	5	57,000,000	5	73,678,000	5	92,045,800	25	9,226,767,800		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional (unit)		29	21,200,000	29	23,000,000	29	24,680,000	29	25,784,000	29	26,122,800	149	120,786,800		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor (Tahun)		1	18,000,000	1	19,800,000	1	20,080,000	1	23,888,000	1	30,276,800	5	112,044,800		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah Meubelair yang dipelihara (Tahun)		1	39,200,000	1	42,800,000	1	48,080,000	1	53,888,000	1	60,276,800	5	244,244,800		
				<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Prosentase Aparatur SKPD mematuhi peraturan kedisiplinan (%)</b>	100	95	72,530,000	80	79,783,000	80	87,761,300	80	96,537,430	80	106,191,173	80	442,802,903		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD ( Tahun ke V )			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (stel)		177	12,300,000	177	13,335,000	177	14,468,500	177	15,315,350	177	17,946,885	885	73,865,735		
				Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah Pakaian Olah Raga (stel)		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
				Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah Peningkatan Kesegaran Jasmani Aparatur Pemerintah Daerah (kali)		48	7,680,000	48	8,448,000	48	9,292,800	48	10,222,080	48	11,244,288	240	46,887,168		
				<b>Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja SKPD</b>	<b>Nilai AKIP SKPD</b>	<b>99</b>	<b>75</b>	<b>30,000,000</b>	<b>75</b>	<b>34,000,000</b>	<b>75</b>	<b>38,400,000</b>	<b>75</b>	<b>43,240,000</b>	<b>75</b>	<b>48,564,000</b>	<b>75</b>	<b>194,204,000</b>		
				Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD	Dokumen Perencanaan Kinerja (Renja, Perubahan Renja dan Penetapan Kinerja)		3	15,000,000	3	16,500,000	3	18,150,000	3	19,965,000	3	21,961,500	15	91,576,500		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD ( Tahun ke V )			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Dokumen Laporan Keuangan (Prognosis, Tribulan, Semesteran, RFK dan Akhir Tahun)		9	8,250,000	9	9,275,000	9	11,100,000	9	12,310,000	9	13,641,000	45	54,576,000		
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Kinerja (LKPJ, LKJIP, LPPD)		6	8,175,000	6	9,275,000	6	11,150,000	6	12,965,000	6	14,961,500	36	49,169,000		
Meningkatkan Pelayanan Publik kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan dan Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat		Program Peningkatan Kualitas Perijinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perijinan di Kecamatan (PATEN)	100	78	82,800,000	79	91,080,000	80	100,188,000	81	110,206,800	82	121,227,480	82	505,502,280		
				Kegiatan Operasional Pelaksanaan Perijinan di Tingkat Kecamatan	Jumlah ijin yang diterbitkan dalam satu tahun (ijin)	0	1	82,800,000	1	91,080,000	1	100,188,000	1	110,206,800	1	121,227,480	5	505,502,280		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD ( Tahun ke V )			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan Pembinaan dan pemberdayaan kepada pemerintah an desa dan masyarakat	Meningkatnya kualitas pemberdayaan kepada pemerintah an desa dan masyarakat	Prosentase Desa beradministrasi Baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes		Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa telah mengisi buku administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)	N/A	60	36,000,000	70	36,300,000	80	36,630,000	90	36,993,000	100	37,392,300	100	183,315,300		
		Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan administrasi baik			Prosentase Desa telah menetapkan peraturan tentang keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)	N/A	60		70		80		90		100		100			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD ( Tahun ke V )			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					Prosentase desa dengan penggunaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan (%)	N/A	60		70		80		90		100		100			
				Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa (kali)		18	18,000,000	18	18,300,000	18	18,630,000	18	18,993,000	18	19,986,000	90	93,909,000		
				Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	Jumlah Fasilitasi Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (kali)		18	18,000,000	18	18,300,000	18	18,630,000	18	18,993,000	18	19,986,000	90	93,909,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD ( Tahun ke V )				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Program peningkatan kualitas perencanaan desa	Prosentase desa telah menyusun dokumen perencanaan desa (RPJM Desa, RKP Desa) dengan kualitas baik (%)																
				Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Desa	Jumlah fasilitasi perencanaan desa yang dilaksanakan (kali)																

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD ( Tahun ke V )			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan ke lembaga ekonomi masyarakat desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat desa	Jumlah BUMDes pada kecamatan		Program peningkatan kapasitas kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	Prosentase desa memiliki BUMDES (%)		60	18,000,000	70	18,300,000	80	18,630,000	90	18,993,000	100	19,986,000	100	93,909,000		
						N/A	0		12.6											
						17	3													
					Prosentase UPK dengan kriteria baik (%)		0		70		80		90		100		100			
				Kegiatan Fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa	Jumlah desa yang mendapatkan fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa (desa)		18	18,000,000	18	18,300,000	18	18,630,000	18	18,993,000	18	19,986,000	90	93,909,000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD ( Tahun ke V )			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Jumlah pelanggaran masyarakat yang ditindak lanjuti		Program Pembinaan Kemasyarakatan	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	N/A	60	20,000,000	70	23,000,000	80	26,300,000	90	29,930,000	100	33,923,000	100	133,153,000		
						N/A														
						N/A														
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan (kali)		48	10,000,000	48	11,500,000	48	13,150,000	48	14,965,000	48	16,961,500	240	56,576,500		
				Kegiatan Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Jumlah pemantauan keamanan dan ketertiban wilayah yang dilaksanakan (kali)		12	10,000,000	12	11,500,000	12	13,150,000	12	14,965,000	12	16,961,500	60	66,576,500		

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN**  
**RPJMD**

Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2016-2021, maka Indikator Kinerja Kecamatan Tahun 2016-2021 beserta targetnya adalah sebagaimana tabel 2.38 berikut :

**INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA HASIL (DALAM RKA/DPA OPD)**

Tabel 2.38

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai AKIP Kecamatan		CC	B	B	BB	A	
2	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Prosentase Desa beradministrasi Baik sesuai ketentuan Permendagri dan Permendes PDT (%)	60%	60%	70%	80%	90%	100%	
	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan administrasi baik	60%	60%	70%	80%	90%	100%	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
5	Jumlah BUMDes pada tingkat Kecamatan		1	3	3	3	3	

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah adalah merupakan bentuk rencana program kerja peningkatan peran kinerja yang disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan strategis dengan mengacu pada kajian dan analisis terhadap visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambakboyo untuk jangka waktu 2016 – 2021.

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tambakboyo akan digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, acuan dan tolok ukur kinerja Kecamatan sebagai OPD. Oleh karena itu substansi dan muatan Renstra OPD dibatasi hanya pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dibiayai.

Dengan mempertimbangkan potensi, sarana dan prasarana serta kemampuan yang ada menjadi pendorong dalam mewujudkan sasaran sesuai program yang telah ditetapkan. Sudah barang tentu keberhasilan pembangunan tidak akan tercapai dengan kerja sebagian pihak. Oleh sebab itu dukungan dan kerjasama serta peran aktif seluruh komponen pemangku kepentingan yang ada merupakan faktor pendukung tercapainya tujuan pembangunan tersebut.

Demikian Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tambakboyo ini disusun agar dapat dijadikan pedoman dan arah dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tahunan pembangunan dan evaluasi atas pelaksanaannya.

**BUPATI TUBAN**

**H. FATHUL HUDA**

**RENSTRA  
KECAMATAN TAMBAKBOYO  
TAHUN 2016 – 2021**

**PEMERINTAHAN KABUPATEN TAMBAKBOYO  
KECAMATAN TAMBAKBOYO  
TAMBAKBOYO 2016-2021**

Jl. Sobontoro No.05 ☎ (0356) 4411388

